

Jalan Lain:

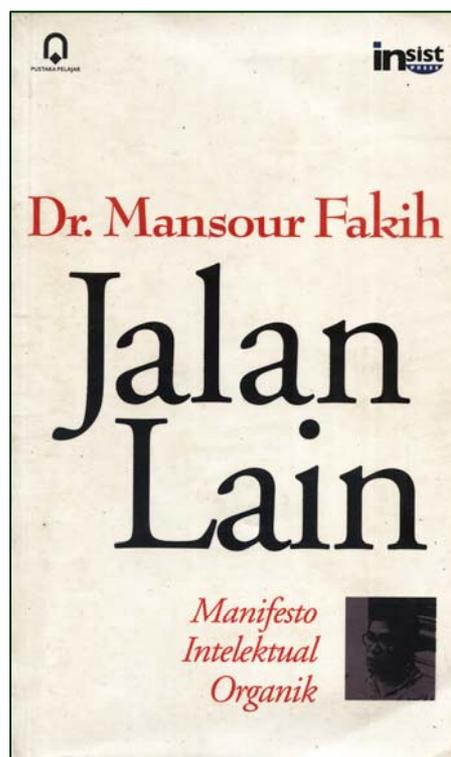
Manifesto Intelektual Organik

A.Zulfikar Ulia

LISENSI DOKUMEN

Copyright: Digital Journal Al-Manar. **Lisensi Publik.** Diperkenankan untuk melakukan modifikasi, penggandaan maupun penyebarluasan artikel ini kepentingan pendidikan dan bukannya untuk kepentingan komersial dengan tetap mencantumkan atribut penulis dan keterangan dokumen ini secara lengkap.

| | |
|----------------|---|
| Judul buku | : Jalan Lain; manifesto intelektual organik |
| Penulis | : Dr.Mansour Fakih |
| Penerbit | : Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Insist Press |
| Tahun terbit | : 2002 |
| Jumlah Halaman | : 364 + xxiv |



Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik

“Jalan Lain”, demikian Mansour Fakih menamakan buku ini. Tentunya dengan harapan bahwa buku ini akan menjadi alternatif, bahkan mungkin rekomendasi bagi para intelektual Indonesia. Beliau namakan para intelektual ini sebagai ‘intelektual organik’. Sebuah sebutan yang mungkin terdengar asing di telinga kita. Intelektual organik, sebagaimana beliau namakan, adalah sebuah komunitas cendekia yang santun, radikal dan kritis. Demikian pula gagasan-gagasan dalam buku ini hadir sebagai hasil dari perenungan dan diskusi yang panjang mengenai keadaan sosial masyarakat, bangsa negara dan bahkan tatanan dunia sekalipun. “Sebagai golongan intelektual, tugas kita memang bukan sekedar ‘memberi makna’ terhadap realitas sosial globalisasi, menguatnya neoliberalisme saat ini, dan meratapinya. Tugas kita sebagai intelektual adalah ikut menciptakan sejarah dengan membangun gerakan pemikiran dan kesadaran kritis untuk memberi makna masa depan kita sendiri.” demikian Mansour Fakih, dalam Prolog buku ini.

Buku ini sebenarnya sebuah kumpulan tulisan dengan beragam tema. Oleh karena itu jangkauan buku ini sangat luas tentang ilmu-ilmu sosial. Tulisan-tulisan yang demikian berbobot dan merupakan hasil kajian pustaka yang mendalam. Buku ini dibagi dalam 3 bagian besar yang terdiri dari beberapa bab. Bagian ke-1, Seputar Teori Perubahan Sosial; bagian ke-2, Pemikiran Tokoh; bagian ke-3, Globalisasi dan Dampaknya.

Dalam bagian ke-1 diuraikan secara panjang lebar tentang Teori Kelas yang menurutnya banyak disalahpahami orang. Hal inilah yang kemudian menjadikan kesalahpahaman yang panjang terhadap Marxisme. Marxisme kemudian menjadi suatu aliran teori-teori ilmu pengetahuan, kebijakan politik, gerakan sosial dan budaya serta praktek politik. Padahal sebenarnya semangat yang mendasari Marx dalam analisisnya berangkat dari pandangan moral keadilan dan cita-cita untuk perubahan sosial menuju masyarakat yang adil. Marx, sebagai individu, coba dipetakan sebagai seorang filosof sosial dan sebagai pemikir keadilan sosial. Dipaparkan juga bagaimana teori kelas berguna untuk menjelaskan eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh kapitalis. Mengenai persoalan kelas sosial dalam masyarakat, Fakih mencoba membandingkan Marx dengan Althusser. Konsep kelas yang diyakini oleh pengikut Marxis, lebih pada *wealth* atau kekayaan. Jadi, jika seseorang memiliki kekayaan yang amat banyak, maka dia disebut kelas elit. Pandangan

seperti inilah yang menyebabkan diciptakannya masyarakat tanpa kelas yang sama rata sama rasa, sebagai mana pernah dipraktekkan di Uni Soviet. Sementara menurut Althusser, persoalan kelas ini adalah persoalan ketidakadilan yang berupa *appropriation of surplus value* yang arti harfiahnya adalah pencurian nilai lebih. Jadi dalam pengertian ini adalah bagaimana menciptakan masyarakat tanpa eksploitasi. Hal ini melibatkan banyak sekali unsur dalam masyarakat dan membutuhkan tata ekonomi yang baru agar kekayaan itu dapat terdistribusi secara adil kepada rakyat. Dalam penutup bab ini Fakih menegaskan bahwa Marxisme bukan agama, melainkan sebagai salah satu aliran pemikiran sosial dalam rangka mencari sistem sosial yang adil. Masyarakat tanpa kelas bukanlah masyarakat yang sama rata sama rasa, melainkan sebuah masyarakat tanpa eksploitasi, pencurian nilai lebih. Sehingga nilai lebih ini tidak hanya dinikmati oleh kapitalis saja, tetapi didistribusikan kepada semua sektor masyarakat melalui pajak ke negara, bunga bank, gaji para manajer, dan lainnya. Untuk itu diperlukan, tidak saja perubahan hubungan *mode of production* saja, tetapi transformasi sosial yang lebih luas lagi terhadap sistem sosial yang tergantung pada nilai lebih tersebut.

Masih dalam bagian ke-1, Fakih juga mengulas tentang ‘Agenda Gerakan Sosial: Reformasi atau Transformasi’. Fakih mencoba melakukan dekonstruksi terhadap wacana yang dominan saat ini, reformasi. Landasan paradigmatis dan teoretik apa yang melatari paham reformasi ini. Menurut Fakih, analisis tentang perubahan sosial yang muncul, kebanyakan diwarnai oleh dua aliran teori sosial yang sesungguhnya saling bertentangan—antara ‘teori modernisasi’ yang berakar pada ‘paradigma sosial positivisme’, dan paham ‘teori sosial kritik’ atau yang juga dikenal dengan ‘ilmu sosial emansipatoris’ seperti teori kritis mazhab Frankfurt, neo Marxisme, juga paham posmodernisme. Panjang lebar Fakih uraikan tentang perubahan sosial yang tengah dilakukan oleh kaum liberal. Perubahan sosial yang tengah terjadi saat ini sedang diuji apakah mampu mentransformasikan relasi sosial politik untuk menjadi relasi yang lebih adil yang berwatak emansipatoris ataukah lebih berupa reformasi sosial. Seharusnya perubahan sosial yang terjadi memiliki perspektif transformatif, dan memiliki jangkauan yang luas baik dari segi metodologi, agenda maupun motivasi. Perubahan sosial yang berperspektif transformatif juga menyangkut hal-hal untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis golongan miskin. Hanya dengan cara yang luas itulah perubahan sosial dapat menyumbangkan transformasi sosial ke arah yang lebih adil.

Tentang ‘Pengetahuan yang Memberdayakan dan Membebaskan’, Fakih mengawali tulisannya dengan pertanyaan mendasar. Apa hakikat ilmu sosial dan penelitian sosial, dan atas kepentingan siapa dan dalam rangka apa sesungguhnya ilmu sosial dan penelitian sosial dilakukan? Pertanyaan ini membawa pada pertanyaan lanjutan, kepada siapa hendaknya pengetahuan sosial dan penelitian sosial diabdikan? Secara umum, pandangan ilmu sosial saat ini didominasi oleh paham objektivisme dan pemikiran yang bersifat regulatori. Pada titik ini para ilmuwan sosial memiliki kekuasaan yang luar biasa besar, bahkan mengalahkan peran yang dimiliki oleh para pemimpin adat dan pemimpin agama. Secara panjang lebar Fakih menguraikan bagaimana seharusnya metode riset partisipatori digunakan sebagai praktek pembebasan. Tugas utama penelitian adalah menciptakan ruang masyarakat untuk mentransformasikan gerakannya. Bagaimana penelitian ini mampu memfasilitasi gerakan masyarakat untuk menyelenggarakan pengkajian kritis yang mempertanyakan asumsi dasar, ideologi dan paradigma mereka dan implikasinya secara teoretik dan praktik terhadap perubahan sosial. Mengenai paradigma perubahan sosial, Fakih mengutip pemikiran Habermas yang membagi paradigma ilmu sosial dalam tiga jenis. Pertama, ilmu sosial sebagai *instrumental knowledge*, pengetahuan lebih dimaksudkan untuk menaklukkan dan mendominasi objeknya. Ilmu sosial diperlakukan sebagai ilmu alam, yang menganut positivisme, mensyaratkan pemisahan fakta dan nilai dalam rangka menuju pada pemahaman objektif atas realitas sosial. Kedua, *hermeneutic knowledge*, ilmu sosial yang dimaksudkan untuk memahami realitas sosial secara sungguh-sungguh, jadi lebih kepada kajian filosofis. Ketiga, *critical/emancipatory knowledge*, ilmu sosial dipahami sebagai proses katalisasi untuk membebaskan manusia dari ketidakadilan. Paradigma ini memperjuangkan pendekatan yang bersifat holistik dan menghindari cara berfikir deterministik dan reduksionistik. Dalam hal ini Fakih lebih sepakat dengan paradigma kritis, sebagaimana dalam tulisannya, “Implikasi dari kritik paradigma ini terhadap positivisme menyadarkan kita akan perlunya merenungkan tentang moralitas ilmu dan penelitian sosial.” Ilmu sosial dengan demikian harus memiliki nilai moral dan memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi untuk kemajuan bersama.

Tentang ‘Fasisme’, Fakih ingin menyadarkan kita bahwa fasisme sesungguhnya mungkin terjadi begitu dekat dengan diri kita, tanpa kita sadari. Dengan mengulas sejarah fasisme yang terjadi di Italia, Jepang dan Jerman, Fakih menengarai kemungkinan besar

fasisme telah dipraktikkan di Indonesia. Mengingat telah terpenuhinya persyaratan objektif munculnya fasisme. Bagaimana partai politik mempraktikkan semangat dan perilaku militeristik. Bagaimana pemerintah menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Dengan penggunaan teror, represi, penjinakan ideologi serta hegemoni. Bahkan para demonstran yang nota bene memperjuangkan dan menegakkan hak-hak asasi manusia, juga telah melakukan tindak kekerasan. Bahkan penerapan *amar ma'ruf nahi munkar*—dalam istilah Islam—telah menggunakan cara-cara yang tidak humanis dengan melanggar hak-hak asasi manusia, hak-hak ekonomi, hak politik, hak reproduksi dan hak perempuan. Juga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sebagai cara yang digunakan untuk menciptakan rumah tangga yang “sejahtera”. Dengan demikian fasisme sesungguhnya sudah merasuki relung berpikir kita tanpa disadari. Fakih berharap agar tulisan ini dapat menyadarkan kita akan keadaan yang tengah terjadi dan mudah-mudahan dapat menghentikan praktik kekerasan yang selama ini dilakukan.

Pada bagian ke-2, Pemikiran Tokoh, Fakih mengulas tentang pokok pikiran para tokoh yang menjadi motor terjadinya perubahan sosial. Tentang Paulo Freire—tokoh pendidikan dari Brazil era 50-an—Fakih menganggap apa yang digagas oleh Freire tidak dapat diaplikasikan secara praktis di dunia pendidikan oleh para pengikutnya. Banyak tema pendidikan Freire yang secara metodologis tidak dapat diterjemahkan ke dalam proses dan teknis belajar mengajar. Yang terjadi adalah pemahaman secara teoretik terhadap ajaran Freire tentang ‘pendidikan adalah proses pembebasan dan pendidikan adalah proses membangkitkan kesadaran kritis’. Sebenarnya Freire sendiri telah mewujudkan pemikirannya dalam sebuah tindak konkret ketika melakukan kegiatan pemberantasan buta huruf untuk petani Brazil. Dalam bukunya, *Pedagogy of the Oppressed*, Freire membongkar watak pasif dunia pendidikan yang berwatak tradisional. Freire mengejek sistem dan praktik pendidikan yang melanggengkan “relasi penindasan” yang disebutnya pendidikan “gaya bank”. Pendidikan “gaya bank” dimana guru bertindak sebagai penabung informasi, sementara murid dijejali informasi untuk disimpan. Untuk itu Freire mengajukan sebuah konsep tandingan dengan *pedagogy of liberation* yakni proses pendidikan ‘hadap masalah’ yang justru mendorong dialog antara murid dan guru. Freire percaya bahwa tugas pendidikan adalah memproduksi kesadaran kritis untuk suatu proses pembebasan. Pendidikan yang tidak pernah berdiri bebas tanpa berkaitan secara dialektis dengan lingkungan dan sistem sosial tempat pendidikan itu diselenggarakan. Dalam hal

ini, untuk mendorong pendidikan yang lebih peka terhadap ketidakadilan sosial, tugas pendidikan adalah melakukan refleksi kritis. Refleksi terhadap sistem dan ideologi dominan yang tengah berlaku di masyarakat, serta menantang sistem tersebut untuk memikirkan sistem alternatif ke arah transformasi sosial menuju masyarakat yang adil. Terkait dengan itu semua, pendekatan Freire terhadap pendidikan dapat dijadikan ilham bagi para pendidik kita. Fakih berharap lewat pendidikan gaya Freire, kaum tertindas, seperti kaum buruh, kaum miskin kota, masyarakat adat, dan kaum tertindas lainnya didorong untuk membebaskan diri dari segala penindasan. Dengan begitu mudah-mudahan akan tercipta masa depan yang lebih baik, yang menjanjikan keberpihakan pada kaum tertindas.

Bagian ke-2 ini, sebagaimana judulnya “Pemikiran Para Tokoh”, berisi ulasan tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam proses perubahan sosial. Seperti yang telah dipaparkan di atas tentang Paulo Freire, Fakih juga mengulas pemikiran Antonio Gramsci. Gramsci adalah seorang aktivis perubahan sosial dari Ales, Sardinia, yang dalam perjalanan hidupnya banyak melakukan kritik terhadap praktik komunisme di Uni Soviet. Pemikiran Gramsci juga merupakan kritik terhadap kecenderungan positivistik dan mekanistik para pengikut Marxisme ortodoks, terutama teori mereka mengenai perubahan sosial dan revolusi. Pengaruh dan sumbangan terbesar dari Gramsci justru kritiknya terhadap pendidikan politik indoktrinasi dan pendidikan sebagai penindasan. Pemikiran Gramsci berpengaruh besar terhadap filsafat dan metodologi pendidikan dialogis dan pendidikan untuk penyadaran kritis dan *participatory research*. Beberapa pemikirannya mengenai *civil society*, *counter hegemony*. Terutama konsepnya mengenai *war opposition* dan *war of maneuver* telah memberikan inspirasi para pencetus ‘*popular education*’ di tahun 70-an dimana pendidikan massa diletakkan sebagai gerakan ‘tandingan terhadap hegemoni dominan’. Pendidikan dalam konteks tersebut merupakan aksi kultural bagi *civil society* untuk membangkitkan kesadaran kritis rakyat terhadap sistem dan struktur yang menyebabkan ketertindasan, eksploitasi, dan berbagai sistem sosial yang tidak adil lainnya seperti struktur kelas, relasi gender, dan rasisme. Di akhir tulisannya, Fakih menyatakan bahwa kesadaran politik kritis terhadap hegemoni dominan dan sistem yang tidak adil, merupakan dasar penting dalam *civil society* yang merupakan perkumpulan sosial politik, masyarakat adat, pesantren, ataupun ornop. Dimana masing-masing anggotanya memiliki kesadaran kritis sebagai ‘intelektual organik’, dalam suatu aksi politik untuk menciptakan sejarah mereka sendiri.

Lebih dari itu, *civil society* juga merupakan gerakan kontra diskursus warga negara terhadap diskursus dominan seperti globalisasi, developmentalisme yang tidak demokratis dan tidak berkeadilan sosial. Oleh karena itu, pendidikan dalam arti membangkitkan kesadaran kritis pada setiap warga negara menjadi bagian mendasar bagi demokratisasi.

Sejajar dengan para tokoh revolusi lainnya adalah Muammar Kadhafi. Tokoh revolusi Libya ini memahami Islam berdasarkan interpretasi sejarah dan teologi Islam secara sosialistik. Sehingga sistem sosialisme yang dibangunnya meletakkan pandangan sosialistik. Tentang hak pemilikan tanah, Kadhafi menganggap bahwa tanah adalah milik Allah dan manusia hanya memanfaatkannya. Untuk itu Kadhafi melancarkan aksi pengaturan sumber daya alam yang lebih adil yang bercorak sosialistik. Pembaharuan keagamaannya justru kemudian menggeser hukum dan yurisprudensi Islam dari arena publik di Libya. Bagi Kadhafi, fikih yang merupakan tafsiran ulama tidak memiliki kekekalan kebenaran seperti al Qur'an. Oleh karena itu revolusi Libya adalah revolusi sosial yang juga merupakan gerakan pengembalian Islam kepada watak dasarnya. Menjadi penting jika pada saat ini para pemikir pembaharuan Islam kembali menengok gerak perjuangan Kadhafi. Sebagaimana Fakih menulis, "Dalam kaitan itulah 'membaca' Kadhafi akan menyumbangkan setetes inspirasi dari lautan inspirasi yang diperlukan untuk membangun pemikiran dan tatanan alternatif yang terbaik yang tengah dicari dan diharapkan bangsa Indonesia saat ini". Dalam membangun masyarakat demokratis, dalam buku *The Green Book* bagian pertamanya, Kadhafi tidak menggunakan landasan sosial politik Islam sebagai suatu golongan eksklusif dan berwatak sektarian. Islam yang dikembangkan oleh Kadhafi adalah Islam rahmat bagi seluruh alam. Hal ini mengandung pengertian suatu perjuangan revolusi untuk membentuk tatanan sosial politik yang memberi manfaat bagi seluruh umat manusia. Dalam tulisan ini Fakih ingin mengingatkan bahwa pilihan agenda demokratisasi selalu mempunyai implikasi yang luas dan jangka panjang terhadap rakyat. Keputusan pilihan pada paham demokrasi tertentu akan berimplikasi terhadap kehidupan sosial politik dan ekonomi rakyat di masa datang.

Tokoh lain yang juga mendapat perhatian Fakih adalah Michel Foucault. Foucault adalah salah satu tokoh posmodernisme Perancis yang pikiran-pikirannya sering digunakan untuk memahami teori perubahan sosial. Posmodernisme berkembang untuk pertama kalinya di Perancis sebagai suatu gerakan pemikiran yang secara mendasar melancarkan kritik terhadap modernisme, yakni suatu ide yang berkembang sejak masa

pencerahan di Eropa. Arkeologi dan genealogi inilah yang menjadi pusat perhatian Foucault. Dengan ini Foucault mendeskripsikan dan menguraikan anatomi suatu kekuasaan yang ada dalam suatu diskursus. Karyanya dalam ‘diskursus’ mempunyai implikasi radikal tidak saja pada disiplin ilmu humaniora, seni dan sastra tetapi untuk semua pengetahuan. Baginya ‘*knowledge is not something that can exist apart power relation*’. Pikirannya akan kekuasaan menyadarkan orang akan relasi ‘kekuasaan’ antara penganut agama-agama Barat yang turun dari langit dan merupakan ‘kebenaran’ dengan kepercayaan dan teologi lokal, ‘pagan’, dan animisme yang perlu “diselamatkan”. Apa yang disebutnya sebagai genealogi membawa pengaruh pada ilmu-ilmu sosial untuk mendorong pemberdayaan rakyat lokal dan akar rumput melalui penyembuhan atau pemuliaan pengetahuan masyarakat yang ditundukkan dan didiskualifikasi oleh hegemoni pengetahuan positivism. Dengan begitu pengetahuan bisa menjalankan tugas transformasi hanya jika pengetahuan membongkar dan menghentikan relasi kekuasaan.

Mengenai uraian panjang di atas, pembahasan utama Fakih sebenarnya pada globalisasi dan dampaknya bagi masyarakat. Globalisasi menurut Fakih adalah sebagai lanjutan dari paham kapitalisme, *developmentalism* yang berakar pada liberalisme. Krisis terhadap pembangunan yang terjadi saat ini pada dasarnya merupakan bagian dari krisis sejarah dominasi dan eksploitasi manusia atas manusia yang lain. Proses sejarah dominasi itu pada dasarnya dapat dibagi dalam tiga periode formasi sosial. Fase pertama adalah kolonialisme, fase kedua dikenal dengan istilah *developmentalism* dan kemudian dilanjutkan oleh neoliberalisme. Pada fase pertama terjadi dominasi secara fisik, fase kedua secara non fisik, dimana negara dunia ketiga yang merdeka masih mendapat “pengawasan” dari bekas penjajahnya. Pendirian neoliberalisme pada prinsipnya tidak bergeser dari liberalisme yang dicetuskan oleh Adam Smith dalam *The Wealth of Nations*. Aturan dasar kaum neoliberal adalah ‘liberalisasikan perdagangan dan *finance*,’ ‘biarkan pasar menentukan harga,’ ‘akhiri inflasi,’ ‘stabilisasi ekonomi makro,’ ‘privatisasi,’ ‘pemerintah harus menyingkir dari menghalangi jalan’. Paham inilah yang saat ini mengglobal dengan mengembangkan konsensus yang dipaksakan, dikenal sebagai globalisasi, sehingga terciptalah tata dunia baru. Arsitek tata dunia ini ditetapkan dalam sebuah rumusan *The Neoliberal Washington Consensus*, yang terdiri dari para pembela ekonomi privat terutama wakil dari perusahaan-perusahaan besar yang mengontrol dan menguasai ekonomi internasional dan memiliki

kekuasaan untuk mendominasi informasi kebijakan dalam rangka membentuk opini publik.

Sejak dikembangkannya kesepakatan *the Bretton Woods* dengan didirikannya IMF dan *World Bank*, serta ditandatanganinya kesepakatan GATT, dunia secara global sesungguhnya telah memihak dan didorong oleh kepentingan perusahaan transnasional (TNCs/*Trans National Corporations*). Untuk itu dengan serta merta negara-negara dunia ketiga mengadakan reformasi mengenai kebijakan ekonomi, politik dan sosial budaya. Implikasi perubahan kebijakan yang memihak kepentingan TNCs ini akan memarginalkan petani, pedagang kecil, nelayan, serta masyarakat adat dalam hal perebutan sumber daya alam terutama tanah, hutan dan laut. Dalam hal ini Fakih sangat menyoroti pembajakan terhadap sumber daya genetika. Keanekaragaman hayati secara umum telah rusak parah, disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, oleh pemakaian varietas unggul yang meningkatkan *displace less profitable plants*. MNCs (*Multi National Corporations*) telah membatasi akses terhadap sumber daya genetika melalui pemakaian paten yang juga sebenarnya merupakan “lambung gen” yang tersedia bagi kelompok produsen terbatas dan petani. Kedua oleh *biopiracy* yang secara efektif dilakukan perusahaan MNCs. Seperti yang terjadi pada Percy Schmeise, seorang petani kecil di Saskatchewan, Kanada. Schmeise dituduh telah secara ilegal menggunakan benih rekayasa genetika Monsanto. Dan akhirnya pengadilan memerintahkan Schmeise untuk membayar beberapa ribu dolar AS pada Monsanto atas pelanggaran hak patennya. Betapa dahsyat jangkauan konsekuensi pengaugerahan HaKI pada benih.

Globalisasi yang terjadi saat ini adalah globalisasi korporasi. Globalisasi korporasi ini pada dasarnya satu globalisasi yang berdasarkan pada prinsip neoliberalisme serta paham pasar bebas. Oleh karena itu, menurut Fakih, globalisasi sesungguhnya lebih tepat dikatakan sebagai globalisasi arus uang dan globalisasi korporasi liberalisme ekonomi. Dalam hal ini kita memerlukan wacana tandingan terhadap paham globalisasi korporasi dominan ini yakni globalisasi dari perspektif rakyat miskin, petani kecil, nelayan, kaum perempuan dan kaum marginal lainnya. Globalisasi yang dimaksud adalah suatu model ekonomi yang mengembalikan peran negara untuk mengatur ekonomi dan politik yang berpihak pada rakyat miskin.

Menghadapi tantangan globalisasi ini, Fakih menengok kepada sejarah lahirnya Islam di tengah elit Quraisy. Ketika itu Islam merupakan gerakan spiritual, moral, budaya,

politik, serta sistem ekonomi alternatif. Selain itu juga Islam lahir sebagai jalan pembebasan dan kemanusiaan dari dua kekuatan global zamannya, yakni kekuasaan Romawi di Barat dan Bizantium di Timur. Tetapi apakah Islam akan dapat mempertahankan citra dan visi spiritual sebagai penebar rahmat, pembebas bagi kaum tertindas, pembebas manusia dari segala alienasi? Apakah Islam mampu menjadi jalan alternatif manusia untuk lepas dari berbagai jeratan ketidakadilan? Apakah Islam mampu melawan gurita ideologi neoliberalisme, marginalisasi politik ekonomi dan peminggiran budaya rakyat akibat jeratan kapitalisme global? Jawaban untuk ini kembali pada teologi dan paradigma pemikiran Islam itu sendiri, karena Islam secara teologi, paradigma maupun teori sosial sangatlah plural. Untuk itu Fakih mencoba melakukan pemetaan terhadap golongan Islam di Indonesia. Pemetaan ini dilakukan berdasarkan ideologi golongan Islam dalam merespon kemiskinan. Fakih menggolongkan Islam, saat ini, dalam empat golongan yakni paradigma/golongan tradisional, modernis, *revivalist*, dan transformatif. Dalam tulisan ini Fakih memaparkan tentang pandangan masing-masing golongan terhadap kapitalisme global. Fakih menganggap peluang besar untuk terjadinya perubahan sosial terdapat pada paradigma transformatif. Merakalah yang diharapkan akan mampu menciptakan ruang dalam proses demokratisasi ekonomi, politik, dan budaya di Indonesia. Akan tetapi golongan ini belum mampu menemukan legitimasi teologis yang mendapat dukungan massa.

Tulisan terakhir yang diberi judul “Panggil Saja Kami Kaum Difabel”, menjadi tulisan yang sangat menarik. Difabel (*differntly able*) atau kelompok manusia yang memiliki kemampuan berbeda adalah istilah yang sedang diperjuangkan untuk menggantikan istilah *disable* ataupun penyandang cacat, karena istilah tersebut mengandung stereotip negatif dan bermakna *disempowering*. Tulisan ini mengupas makna kecacatan dalam kaitannya dengan nasib dan kehidupan terhadap manusia yang mendapat label sebagai penyandang cacat, dan apa asumsi di balik penyelenggaraan kegiatan, santunan, maupun pendidikan bagi mereka yang mendapat julukan kaum penyandang cacat tersebut. Dengan kata lain apakah bimbingan sosial, santunan, serta pendidikan yang ditujukan kepada mereka ini berperan dalam pemberdayaan dan membangkitkan kemanusiaan mereka atau justru menjadi bagian dari masalah, yakni semakin terjadinya proses dehumanisasi bagi mereka yang dijuluki penyandang cacat tersebut. Untuk mamahami masalah ini, Fakih membagi tulisannya dalam tiga bagian. Pertama, dibahas tentang bagaimana konstruksi sosial

penyandang cacat dan akibatnya terhadap diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan terhadap penyandang cacat. Bagian kedua tentang bagaimana konstruksi ideologi normalitas tersebut diletakkan dalam struktur formasi sosial dewasa ini. Bagian ketiga adalah analisis mengenai berbagai paradigma pendidikan dalam kaitannya dengan nasib penyandang cacat. Dalam uraiannya Fakih mengkritik terhadap institusi dan kebijakan pendidikan yang sama sekali tidak humanis dan diskriminatif. Pendidikan sebagai bagian dari masyarakat justru menjadi pelanggeng proses dehumanisasi. Seharusnya pendidikan, meminjam istilah Freire, adalah proses memanusiakan manusia kembali. Mengakhiri tulisannya, Fakih nyatakan bahwa dalam konteks memanusiakan penyandang cacat, pendidikan perlu mengubah visi ideologi mereka terhadap penyandang cacat. Apa yang diperlukan adalah dekonstruksi terhadap paham cacat-normal yang selama ini tanpa disadari dilanggengkan juga oleh sistem pendidikan. Perjuangan penyandang cacat untuk bebas dari diskriminasi dan ketidakadilan tidak saja menyangkut aksesibilitas dalam sistem sosial, politik, ekonomi, budaya, serta lingkungan infrastruktur yang ada, namun justru yang lebih berat adalah peluang mengubah asumsi dan ideologi cacat-normal yang telah mengakar di masyarakat. Dalam konteks itulah perubahan ideologi pendidikan menuju ‘sensitif terhadap penyandang cacat’ menduduki posisi penting.

Demikian akhir dari keseluruhan kumpulan tulisan dalam buku ini. Sekalipun bidang bahasannya berbeda-beda, tetapi kita dapat menarik benang merah dari apa yang ingin disampaikan oleh Mansour Fakih. Fakih ingin membuka ruang kritis dan perenungan yang dalam bagi kita semua mengenai permasalahan yang tengah terjadi di Indonesia saat ini. Bahwa segala yang terjadi merupakan sebuah konstruksi dari sebuah kekuatan yang perlu kita waspadai dan kita kritisi bersama, yaitu kekuatan kapitalisme global. Buku ini menjadi penting untuk dibaca, karena mengandung informasi yang luas dan merupakan hasil kajian pustaka yang mendalam. Terutama untuk bagian ‘Pemikiran Para Tokoh’, tulisan Fakih ini dapat menjadi pengantar yang memadai dan mungkin menjadi intisari dari pemikiran para tokoh tersebut. Terlepas dari itu semua, buku ini cukup sulit untuk dipahami. Oleh karena itu dibutuhkan konsentrasi yang tinggi dan keterbukaan untuk menerima berbagai ide yang dilontarkan oleh penulis.